



JABABEKA & CO.

**PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.
("PERSEROAN")**

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya quorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Juli 2022 ("Rapat Pertama") sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily pada hari ini Selasa, 12 Juli 2022, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : **Jumat, 29 Juli 2022**
Waktu : Pukul 09.30 WIB - selesai
Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar,
Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT") dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Perseroan

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT serta Anggaran Dasar Perseroan, mengenai penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diputuskan dalam Rapat.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.

4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT serta Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.jababeka.com.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warik maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") tanggal **11 Juli 2022** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

3. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul *e-Proxy* dan Modul *e-Voting* pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat, saat ini KSEI telah menyediakan platform *e-RUPS* untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easv.ksei.co.id/egken> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.

4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang sahnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.

5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah **paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat**.

6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*)** kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat.

- b. **Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa** yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.jababeka.com, dengan ketentuan:

- 1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
- 2) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.

7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, akta perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan www.jababeka.com.

10. Untuk menjaga ketertiban Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Juli 2022
Direksi Perseroan

SEKTOR DIGITAL SELAMATKAN EKONOMI RI

Naik 26%, Transaksi Perbankan Digital Diprediksi Rp 51 Ribu Triliun

BADUNG – Bank Indonesia (BI) memproyeksikan nilai transaksi layanan perbankan digital tahun ini mencapai Rp 51 ribu triliun, naik 26% dibandingkan tahun lalu. Hal ini ditopang akselerasi transaksi ekonomi dan keuangan digital, meningkatnya penerimaan dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, serta perluasan pembayaran dan *digital banking*.

Oleh Triyan Pangastuti

“Kami ucapkan terima kasih, karena kenaikan transaksi perbankan digital adalah hasil sinergi sejumlah pihak,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022, di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7).

Dalam pandangan Perry, sektor digital menjadi penyelamat ekonomi Indonesia di masa pandemi Covid-19. Sebab, sektor ini tumbuh inklusif dan keberlanjutan selama pandemi dan mampu memacu pertumbuhan ekonomi domestik. Ke depan, sektor ini akan menjadi pilar ekonomi Indonesia.

Dia menjelaskan, digitalisasi juga menyengat sektor keuangan nasional. Sektor ini terus berakselerasi, tercermin pada transaksi *e-commerce* tahun ini yang diproyeksikan naik 31% menjadi Rp 536 triliun, kemudian uang

elektronik Rp 360 triliun atau naik 18%. Saat ini, dia menyatakan, bank sentral di negara-negara ASEAN juga mengembangkan sistem pembayaran yang bisa digunakan di sejumlah negara atau *cross border*. Berdasarkan data BI, nilai transaksi uang elektronik pada Mei 2022 tumbuh 35,25% (*year on year/yoy*) mencapai Rp 32 triliun dan nilai transaksi *digital banking* meningkat 20,82% (*yoy*) menjadi Rp 3.766,7 triliun. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit hanya mengalami peningkatan 5,43% (*yoy*) menjadi Rp 630,9 triliun.

Sebelum pandemi Covid-19, kata Perry, pada Mei 2019, BI juga telah meluncurkan *blue print* sistem pembayaran Indonesia. Peluncuran ini memiliki tujuan untuk mendorong transaksi ekonomi dan keuangan melalui digital. “Dalam lima tahun, kami digitalkan sistem pembayaran, karena tidak ada transaksi ekonomi dan keuangan yang



Perry Warjiyo

tidak melalui sistem pembayaran,” jelas Perry.

Di sisi lain, BI juga terus mendukung penggunaan sistem pembayaran digital dengan meluncurkan QRIS dan BI *Fast* untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk dalam ekosistem digital. Hingga saat ini jumlah *merchant* yang tersambung dengan

QRIS mencapai 18,7 juta. Dari jumlah itu, sebanyak 80-90% merupakan kalangan UMKM.

“Tahun ini, jumlah *merchant* QRIS ditargetkan 30 juta dan semoga dalam tiga tahun ke depan seluruh UMKM sebanyak 65 juta sudah terdigitalisasi,” tutur Perry.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kehadiran digitalisasi membuat perbankan yang sebelumnya bermasalah menjadi sehat. Hal itu tidak terlepas pada berbagai kemudahan layanan yang ditawarkan oleh digitalisasi.

“Banyak bank digital muncul dan dengan adanya digitalisasi, bank menjadi sehat,” kata Airlangga.

Dia menegaskan, sejak adanya digitalisasi, likuiditas bank bermasalah membaik. Selain itu, bank kini lebih efisien. Oleh karena itu, ke depan, dia meyakini semakin banyak bank konvensional yang memiliki layanan bank digital.

Indonesia Tujuan Investasi Digital Terpopuler di Asia Tenggara

BADUNG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia kini menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara. Hal ini sejalan dengan cepatnya akselerasi ekonomi digital di Tanah Air.

“Saat ini, ada 2.391 *startup*, dua *decacorn*, dan delapan *unicorn* di Indonesia. Alhasil, Indonesia menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara atau mewakili 40% digitalisasi di Asia Tenggara,” ucap Airlangga dalam pidato pembukaan pada Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7).

Menurut dia, pemerintah berkomitmen terus melakukan reformasi struk-

tural perekonomian Indonesia untuk mendukung inovasi dan transformasi digital. Komitmen ini diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan prospek yang cerah, Airlangga berharap digitalisasi ekonomi dan keuangan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Dengan demikian, pemerintah memproyeksi potensi ekonomi digital Indonesia memiliki prospek yang sangat baik karena berpotensi tumbuh hingga delapan kali lipat, sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja secara *online*, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital.

Selanjutnya, Airlangga Hartarto mengatakan pentingnya meningkat-

kan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu kunci untuk mempercepat digitalisasi. Hal ini dinilai penting lantaran pertumbuhan ekonomi digital bergantung pada kualitas manusia yang mengoperasikannya.

“Jangan sampai digitalisasi yang dilakukan di Indonesia masih menggunakan *back office* di Bangalore India. Ini kita minta para *startup*, *unicorn*, dekarom memindahkan *back office* mereka,”ujarnya.

Di sisi lain, ekonomi dan keuangan digital Indonesia dinilai cukup potensial oleh sejumlah negara. Alhasil pemerintah ingin potensi ekonomi digital yang besar di Tanah Air dapat terus dikembangkan dan dimanfaatkan anak bangsa, alih-alih oleh bangsa lain.

Dukungan pengembangan ekonomi digital telah terlihat dari komitmen yang disampaikan perusahaan perangkat lunak asal Amerika Serikat International Business Machine (IBM) yang tertarik melakukan investasi di Nongsa Batam.

“IBM pergi ke Nongsa Digital Park. Mereka akan mendirikan *Hybrid Cloud Academy*, ini khusus untuk mendorong data center dengan *cloud*-nya, dengan komitmen sekitar 500 megawatt data, 200 mau *groundbreaking*. Ada tiga *cloud* di Nongsa, IKN, dan sekitar Jakarta,”papar dia.

Melalui komitmen ini, Airlangga berharap akan mendukung kemajuan pengembangan ekonomi digital nasional. Alhasil, penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai di dalam ekosistem tersebut menjadi hal yang tidak bisa dikompromikan. Apalagi, dalam 15 tahun ke depan, diperkirakan tersedia 9 juta lapangan kerja di sektor digital.

“Dengan demikian selain fiber optik, *data center*, kita butuh pendidikan. Kita butuh 600 ribu *digital talent* setiap tahun atau 9 juta untuk 15 tahun. Jadi, SDM ini penting, jangan sampai *market* kita besar, tetapi yang memanfaatkan ekspatriat non-Indonesia,” kata dia. (try)

Belanja Pemerintah Dinilai Tak Fleksibel

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, belanja APBN tidak fleksibel. Akibatnya, belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I-2022.

“Masalahnya, ketika konsumsi masyarakat positif, pemerintah malah negatif. Nah, ini menunjukkan, kita masih punya PR, yakni APBN tidak fleksibel,” ucap ekonom Indef Aviliani dalam acara Rilis Survei Nasional Indikator Politik Indonesia, Senin (11/7).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kuartal I-2021, belanja pemerintah mencapai Rp 523 triliun. Namun, pada kuartal I-2022, jumlahnya turun menjadi Rp 490,6 triliun. Padahal, penerimaan negara naik dari Rp 379,4 triliun pada kuartal I-2021 menjadi Rp 501 triliun.

Dia mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, lantaran ketidakpastian masih terjadi dalam perekonomian nasional dan

global. Dia menilai, harus ada faktor diskresi yang memindahkan anggaran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Misalnya, tadinya anggaran digunakan untuk vaksin, ketika sudah membaik harus dipindahkan.

“Memindahkan anggaran itu butuh waktu akibatnya belanja pemerintah jadi negatif dalam waktu kuartal I,” ujar dia. Aviliani mengungkapkan, ketika pandemi sudah mulai reda, optimisme masyarakat cukup tinggi. Buktinya, survei Bank Indonesia menunjukkan, indeks kepercayaan masyarakat sudah di atas 100.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahilil Lahadalia mengatakan, pemerintah memakai sistem rem dan gas dalam penanganan pandemi Covid-19. Dari sisi ekonomi, pemerintah berupaya menciptakan kepastian pendapatan. Sebab, ekonomi rumah tangga itu bisa terjadi kalau ada daya beli.

Bangun Infrastruktur Digital, Pemerintah Tambah Anggaran Kominfo

BADUNG – Pemerintah menggeber pembangunan infrastruktur digital di Tanah Air. Oleh sebab itu, pemerintah terus menambah anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, pemerintah berkomitmen memperluas pembangunan infrastruktur digital untuk memberikan jangkauan jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui anggaran Kominfo yang terus dinaikkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Dia menceritakan, sejak awal pandemi Covid-19 terjadi pada 2020, hanya dua kementerian dan lembaga yang anggarannya tidak dipotong untuk penanganan dan pengendalian Covid-19 yakni Kementerian Kesehatan dan Kominfo. “Sebaliknya, anggaran Kominfo malah ditambah, yakni Rp 20 triliun pada 2020, lalu 2021 sebesar Rp 26 triliun, dan 2022 Rp 27 triliun, dengan tujuan membangun infrastruktur,” ucap dia dalam rangkaian *side event* G20, di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/7).

Menurut dia, hingga saat ini masih banyak daerah tertinggal infrastruktur digitalnya. Bahkan, dalam terdapat 84 ribu desa dan kelurahan, 250 ribu sekolah hingga 10 ribu puskesmas belum terkoneksi internet.

“Jadi kalau bicara *government to people*, kita harus menuju ke digital. Bagaimana kita bisa mendigitalisasi pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Dia menambahkan, pemerintah menggunakan layanan digital seperti Peduli Lindungi selama pandemi Covid-19. Di samping itu, pemerintah mendorong berbagai sektor untuk mulai memanfaatkan digitalisasi guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. (try)



Investor Daily/GaGARIN

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Suasana lanskap ibu kota terlihat dari kawasan Gondangdia, Jakarta, beberapa waktu lalu. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 akan mencapai level 5,1 persen atau turun 0,1 persen dari proyeksi sebelumnya, namun demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

PERTEMUAN SHERPA KEDUA Menko Airlangga Yakin G20 Capai Konsensus

JAKARTA – Presidensi G20 Indonesia meyakini, konsensus akan dicapai para delegasi dalam mempertimbangkan jalan keluar untuk isu-isu prioritas. Keyakinan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan *opening remarks* secara virtual pada Pertemuan Sherpa Kedua, Minggu (10/7/2022).

“G20 sebagai forum ekonomi global utama harus bertindak bersama mengatasi tantangan global yang multidimensi dan saling terkait. Pada hari ini kita memiliki tanggung jawab untuk memikirkan orang lain dan memberikan solusi yang nyata,” ujar Menko Airlangga, dikutip dari keterangan resmi, Senin (11/7).

Dalam pertemuan yang diselenggarakan di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, Menko Airlangga menyampaikan, jutaan orang yang terkena dampak konflik antarnegara mendambakan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan, yang sempat hilang karena konflik atau perang. Sherpa adalah pemimpin negara-negara G20.

“Rasa kemanusiaan harus dikedepankan dan menjadi yang utama dalam pertemuan Labuan Bajo. Tanggung jawab kita adalah memberikan solusi untuk mengatasi keluhan mereka, memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga tidak ada orang, negara, atau wilayah yang ditinggalkan. Dengan demikian, G20 dapat memberikan jalan bagi stabilitas, pemulihan, dan kemakmuran global,” tegas Menko Airlangga.

Menurut dia, inflasi serta ketahanan pangan dan energi dikawatirkan akan menghambat ekonomi global sekaligus mempersulit upaya pencapaian target *sustainable development goals* (SDGs). Sebagai salah satu negara *champions* dari Global Crisis Response Group (GCRG), Indonesia juga diharapkan dapat membantu memberikan solusi atas krisis keuangan, pangan, dan energi yang terjadi di dunia.

Forum ekonomi utama ini, kata Airlangga, harus mampu menunjukkan kepemimpinan global dengan memberikan solusi untuk mengatasi tantangan yang ada saat ini maupun dalam jangka panjang. Indonesia juga mengharapkan dukungan dari seluruh negara anggota G20 untuk mendapatkan konsensus bagi aksi yang praktis dan konkret untuk menunjukkan, G20 benar-benar merupakan forum ekonomi utama, termasuk di dalamnya tiga prioritas presidensi, yakni kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital, dan transisi energi.

Kelompok G20, demikian Airlangga, juga harus mampu melihat ke depan dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi global. Agenda 2030 untuk SDGs juga harus menjadi pedoman negara anggota G20, terutama membantu meningkatkan kehidupan di negara-negara berkembang yang rentan. Indonesia memahami situasi dunia saat ini, sehingga Sherpa menyerukan persatuan supaya dapat dihasilkan solusi atas kebijakan dan keuangan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dunia saat ini. (ac)

JABABEKA & CO.

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan rincian sebagai berikut :

Hari, tanggal : Jumat, 8 Juli 2022
Waktu : 10.25 – 10.42 WIB
Tempat : President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jl. KH. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta Pusat 10220

Mekanisme : Secara fisik dan elektronik menggunakan aplikasi eASY.KSEI

Konferensi Media : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom

A. Pimpinan Rapat
Rapat tersebut dipimpin oleh Bapak Suhardi Alius, selaku Wakil Komisaris Utama, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Juni 2022.

B. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- Bapak Suhardi Alius selaku Wakil Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen.
- Bapak Gan Michael selaku Komisaris merangkap Komisaris Independen.
- Bapak Tjahjadi Rahardja selaku Wakil Direktur Utama.
- Bapak Hyanto Wihadi selaku Direktur, dan
- Bapak Sutedja Sidarta Darmono selaku Direktur.

C. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat
Rapat dihadiri oleh 6.582.902.443 saham atau 46,672% dari 20.824.888.369 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan 292.500.000 saham merupakan saham *Treasury* atau seluruhnya sebanyak 20.532.388.369 saham yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.

Oleh karenanya, ketentuan mengenai kuorum kehadiran untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UUPU juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 juncto Pasal 23 ayat 1. Anggaran Dasar Perseroan, TIDAK TERPENUHI.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Perseroan akan melakukan Pemanggilan Rapat Kedua sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 12 Juli 2022
Direksi Perseroan

JABABEKA & CO.

PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK.

(“PERSEROAN”)

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

Sehubungan dengan tidak terpenuhinya kuorum yang disyaratkan dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Juli 2022 (“Rapat Pertama”) sebagaimana telah diumumkan dalam Ringkasan Risalah Rapat Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily pada hari ini Selasa, 12 Juli 2022, dengan ini Direksi Perseroan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 29 Juli 2022
Waktu : Pukul 09.30 WIB – selesai
Tempat : President Lounge, Menara Batavia Lantai Dasar, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPU”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari Rapat Perseroan
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPU serta Anggaran Dasar Perseroan, mengenai penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diputuskan dalam Rapat.
3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPU dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar pada OJK yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut.
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.
Penjelasan: Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UUPU serta Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan meminta persetujuan Rapat untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan atas usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk tahun buku 2022.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga pada situs web Perseroan www.jababeka.com.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, baik saham-saham dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan Rapat secara elektronik. Oleh karenanya sebagai upaya pencegahan penyebaran wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Perseroan memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir pada Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easys.ksei.co.id/egkm> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
4. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 adalah pemegang saham individu lokal yang namanya dijamin dalam penitipan kolektif KSEI.
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan konfirmasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan kuasa secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir (secara fisik maupun elektronik) dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mewakili pemegang saham dan memberikan suara dalam Rapat melalui eASY.KSEI. Pihak Independen adalah staf dari PT. Datindo Entrycorn, Biro Administrasi Efek (“BAE”) yang ditunjuk khusus oleh Perseroan dalam pelaksanaan Rapat.
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.jababeka.com, dengan ketentuan:
 - 1) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - 2) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang saham dan/atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta dengan hormat wajib membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran, sebelum memasuki ruang Rapat. Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan menyerahkan 1 (satu) rangkap fotokopi akta pendirian, atau perubahan terakhir serta akta pengangkatan pengurusnya (direksi dan dewan komisaris) yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Perseroan tidak menyediakan bahan mata acara Rapat dalam bentuk cetak, namun dapat diunduh melalui situs Perseroan dan/atau dalam situs resmi eASY.KSEI sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.
9. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik atau hadir dan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Tata Tertib Rapat Perseroan yang dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi eASY.KSEI atau menu RUPS pada web Perseroan www.jababeka.com.
10. Untuk agenda keterlibatan Rapat, Pemegang Saham dan/atau kuasanya diminta hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 12 Juli 2022
Direksi Perseroan